

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN *STUNTING* DI PEKON
PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2021**

(Skripsi)

Oleh:

**DELA ROSITA SARI
NPM. 1816041005**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN *STUNTING* DI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021

Oleh :

Dela Rosita Sari

Stunting merupakan kondisi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan dibawah rata-rata balita pada umumnya. Angka *prevalensi stunting* di Indonesia masih melebihi batas normal yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu sebesar 26,92% pada tahun 2020. Pringsewu merupakan satu dari 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan *stunting* tahun 2021. Pringsewu menetapkan 21 Pekon sebagai lokus penanganan *stunting*, Pekon Pamenang menjadi Pekon dengan tingkat prevalensi *stunting* tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan *stunting* di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang belum dilaksanakan dengan baik dengan tiga pilar keberhasilan implementasi menurut Jones (1996) organisasi, interpretasi dan penerapan. Organisasi yang berperan dalam implementasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya pembagian tugas dan tupoksi antar anggota tim. Interpretasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang telah sesuai dengan Surat Edaran *Stunting* Nomor 050/572/B.01/2021 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021. Namun pemahaman masyarakat dan pelaksana kebijakan masih kurang tentang *stunting*. Penerapan kegiatan penanganan *stunting* telah dilakukan dengan baik dan rutin namun dalam pelaksanaannya tim Gebrak Princes tidak mengetahui adanya pedoman kinerja. Faktor pendukung implementasi penanganan *stunting* di Pekon Pamenang adalah kader pembangunan manusia, bantuan susu dan vitamin dari Pemerintah Pekon Pamenang, alat pendukung yang telah tersedia. Faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya pengetahuan anggota tim tentang pedoman kinerja.

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan *Stunting*, Organisasi, Interpretasi,

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF STUNTING POLICY IN PEKON PAMENANG, PAGELARAN DISTRICT, PRINGSEWU REGENCY IN 2021

By:

Dela Rosita Sari

Stunting is a condition of children under five years old (toddlers) who have a height below the average toddler in general. The stunting prevalence rate in Indonesia still exceeds the normal limit set by the World Health Organization (WHO), which is 26.92% in 2020. Pringsewu is one of 260 regencies/cities designated as priority areas for handling stunting in 2021. Pringsewu sets 21 Villages as the locus of handling stunting, Pekon Pamenang is the Pekon with the highest stunting prevalence rate. This study aims to see the suitability of organizational aspects, interpretation, and implementation in implementing stunting policies in Pekon Pamenang, Pagelaran District, Pringsewu Regency. This study uses descriptive qualitative methods through interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that the implementation of stunting management policies in Pekon Pamenang has not been implemented properly with the three pillars of successful implementation according to Jones (1996) organization, interpretation and application. Organizations that play a role in implementation have not gone well because there is no division of tasks and duties among team members. The interpretation of the stunting handling policy in Pekon Pamenang is in accordance with the Stunting Circular Number 050/572/B.01/2021 and Pringsewu Regent Regulation Number 8 of 2021. However, the understanding of the community and policy implementers is still lacking regarding stunting. The implementation of stunting handling activities has been carried out properly and routinely, but in practice the Gebrak Princes team was not aware of any performance guidelines. Supporting factors for the implementation of stunting management in Pekon Pamenang are human development cadres, milk and vitamin assistance from the Pekon Pamenang Government, the supporting tools that are already available. The inhibiting factors are limited human and financial resources, lack of knowledge of team members about performance guidelines.

Keywords: Implementation, Handling Stunting, organizational, interpretation

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN *STUNTING* DI PEKON
PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2021**

Oleh:

DELA ROSITA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING
DI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021**


Nama Mahasiswa : **Dela Rosita Sari**

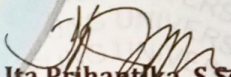
No. Pokok Mahasiswa : **1816041005**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

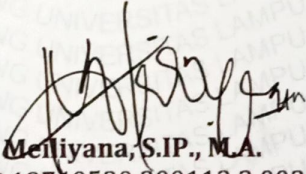
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Rahayu Sulistyowati, S.Sos., M.Si.
NIP 19710122 19951 2 2001


Ita Prihanika, S.Sos., M.A.
NIP 1984063020 1504 2 002

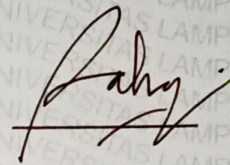
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

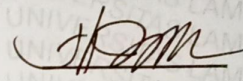
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

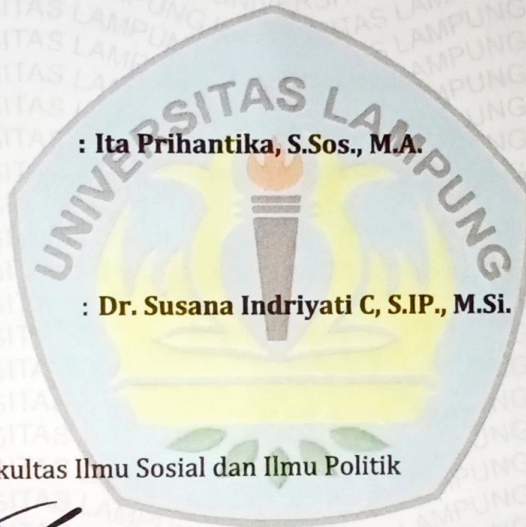
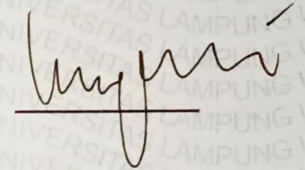
Ketua : Rahayu Sulistyowati, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



Penguji : Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dandicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 19 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Dela Rosita Sari
NPM 1816041005

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 12 Mei 2001 di Desa Kalirejo, Negerikaton, Pesawaran. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yahya dan Ibu Poniseh. Memiliki satu orang adik laki-laki bernama Dio Raditya. Penulis bertempat tinggal di Dusun Mekarjaya, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Budi Mulya (2005-2006), Sekolah Dasar di SDN 8 Negeri Katon (2006-2012). Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 18 Pesawaran (2012-2015) dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Gadingrejo (2015-2018). Pada bulan Agustus tahun 2018, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan sebagai penerima beasiswa Bidikmisi. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif dalam beberapa organisasi yaitu Korps Muda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM UNILA) pada tahun 2018, kemudian tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM UNILA) sebagai anggota bidang Kepemudaan 2019-2020. Penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Sekretaris bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) tahun 2020-2021. Pada bulan Januari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalirejo, Negeri Katon, Pesawaran.

Penulis juga mengikuti program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (*KMMI*) di *London School Public Relations (LSPR)* dan Kampus Mengajar di SDN 14 Negeri Katon pada tahun 2021. Kemudian pada bulan Agustus hingga Desember penulis melaksanakan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

**"Hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik dan tidur yang cukup."
– Knute Nelson."**

**"Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya "
-Unknown**

**"Harga yang harus kita bayar atas waktu yang kita sia-siakan saat menunda pekerjaan adalah kehidupan dan mimpi-mimpi yang seharusnya kita capai."
-Unknown**



Dengan mengucapkan Syukur *Alhamdulillah* atas Rahmat dan segala limpahan nikmat dan hidayah Allah SWT.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Saya persembahkan karya tulis ini, Untuk orang-orang yang aku sayangi dan ku cintai :

Bapakku Yahya dan Ibu Poniseh Tercinta,

Yang selalu mendoakan, segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa yang Bapak dan Ibu panjatkan di setiap sujud siang-malam. Terimakasih untuk pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan. Saya selalu bersyukur kepada Allah SWT karena ditakdirkan menjadi anak dari orangtua yang hebat seperti Bapak dan Ibu.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima kasih untuk seluruh Dosen terutama dosen pembimbing dan pembahas yang telah memberikan bimbingan serta saran terbaiknya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dukungan dan doa. Terimakasih untuk Staff dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari yang maha kuasa

SANWACANA



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.A.N.) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan dan kendala tersebut *Alhamdulillah* dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi iniantara lain :

1. Ibu Rahayu Sulistyowati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, Terimakasih banyak telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala Ilmu pengetahuan, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, kesabaran, saran dan masukan untuk perkembangan skripsi saya. Segala cerita yang ibu sampaikan di bimbingan merupakan tambahan wawasan dan pelajaran baru untuk saya. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih telah menginspirasi saya dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bekal pengetahuan dan saran kepada saya, Terimakasih atas segala doa, ilmu, bimbingan, motivasi, dan arahan yang Ibu berikan, Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran

dalam segala hal kedepannya.

3. Ibu Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si. selaku Dosen Penguji. Terimakasih telah menginspirasi saya dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bekal pengetahuan dan saran kepada saya, Terimakasih atas segala doa, ilmu, bimbingan, motivasi, dan arahan yang Ibu berikan, Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas bimbingan, ilmu, saran maupun masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr.Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan. Terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, bimbingan dan arahan serta semangat selama perkuliahan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.
7. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si, Terimakasih banyak atas kepercayaannya kepada penulis untuk dapat menjadi asisten dosen. Terimakasih atas segala doa, ilmu, bimbingan, motivasi, dan arahan yang Bapak berikan, Semoga kebaikan Bapak selama ini mendapat balasan kebaikan oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran dalam segala hal kedepannya
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas ilmu untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam memberikan ilmu selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis dan mahasiswa lainnya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ladang pahala yang terus mengalir dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah SWT.
9. Mbak Wulan dan Pak Juhari selaku Staff Administrasi Negara. Terimakasih telah memberikan pelayanan administrasi dan membantu penulis dalam kelancaran pengurusan administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir. Semoga Mba Wulan dan Pak Juhari selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran.

10. Teristimewa dan orang yang kubanggakan serta kusayangi yaitu kedua orang tuaku, Bapak Yahya dan Ibu Poniseh. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua doa, harapan, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, perhatian serta kerja keras bapak dan ibu dalam membantu meraih cita-cita dan gelar sarjana, Semoga ilmu yang diperoleh selama ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan dapat membanggakan. Adikku satu-satunya Dio Raditya dan Pakdeku Prayitno. Terimakasih telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama ini. Semoga kalian semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan limpahan rezeki dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, aamiin.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu, khususnya bidang Pembangunan manusia. Terima kasih Bapak Christiano, Ibu Yulia, Ibu Keke, Bapak Bambang, Mas ijal yang telah membantu dan membimbing penulis dalam melakukan magang sekaligus mengumpulkan data untuk kebutuhan skripsi.
12. Seluruh Pemerintah dan Masyarakat Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga mempermudah penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah SWT berlipat ganda, aamiin.
13. Sahabat seperjuangan yang menemani sejak Maba yang membantu dan menemani penulis hingga saat ini. Untuk keluarga bahagia (KBG) Chiesa, Riki, Rosi, Susanti, Rahma, Aldi, Asri. Untuk boti-boti club (BBC) Zanu, Vita, Heri, Viska, Meylin. Terimakasih banyak telah menjadi teman berjuang terbaik sekaligus partner bercerita selama proses perkuliahan hingga akhir. Terima kasih banyak telah membantu dan ikut serta berproses dalam pendewasaan diri serta penyelesaian perkuliahan ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT serta selalu diberikan kesehatan, rezeki dan dipermudah dalam menggapai cita-cita, semoga sehat selalu dan penulis berharap semoga tali persahabatan ini tetap terjalin sampai akhir hayat nanti.
14. Demisioner HIMAGARA Kabinet Cakra Byakta 2021 yaitu Anggara, Dimas, Vita, Riki, Iqbal, Susan, Ridho, Agung, Klarisa, Zanu, Gandhi, Krisdi, Fiola, Rosi, Rahma, dan Kabid KPK Khozin. Terimakasih telah berproses dan berjuang bersama hingga

akhir kepengurusan serta memberikan banyak pengalaman kepada penulis.

15. Angkatan Andalusia. Terimakasih telah hadir mewarnai dunia perkuliahan penulis mulai dari tahun 2018 hingga saat ini, khususnya Zanu, Diavinka, Dona, Daniela, Safwa, Ade Ranie, Nurlika, Melin, Asmiati, Nadya Rahma, Mita, Ega, Muti, Yeni, Putu, Fiola, Kadek, Albi, Avin,Dea dan Panji Sastrawan. Terimakasih banyak telah ikut berkontribusi dalam lika-liku perkuliahan ini, Terimakasih banyak atas dorongan, masukan dalam bentuk apapun yang kalian berikan pada penulis. Terimakasih atas segala cerita selama dunia perkuliahan, Semoga tali silaturahmi kita semua terus terjaga dengan baik. serta kalian semua selalu sehat dan dipermudah dalam menggapai cita-cita.
16. Adek tingkat Administrasi Negara Reza, Srei, Risandi (2019), Syifa, Okta, Ajul, Caya (2020). Terimakasih banyak atas dorongan, masukan dalam bentuk apapun yang kalian berikan pada penulis. Terimakasih atas segala cerita selama dunia perkuliahan, Semoga tali silaturahmi kita semua terus terjaga dengan baik. serta kalian semua selalu sehat dan dipermudah dalam menggapai cita-cita.
17. Staff Kepemudaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM UNILA), khususnya Tinar, Arda, Bahrul, Litha (2019), Firli, Aulia, Salsa, Ray, Senja, Rizki, Ayu, Afsa, Reza, Nana, Adit, Ryan, Kirei, Yusuf (2020). Terima kasih telah menemani penulis berproses dan progres selama masa kepengurusan di BEM. Semoga tali silaturahmi kita semua terus terjaga dengan baik serta kalian semua selalu sehat dan dipermudah dalam menggapai cita-cita.
18. Abang dan Mbak yang membantu penulis selama berorganisasi di kampus, khususnya Bang Raka, Mbak Septa, Bang Hikmawan, Mbak Yeyen, Mbak Anisa. Terima kasih telah berbagi pengalaman yang belum pernah didapatkan oleh penulis sebelumnya. Semoga tali silaturahmi kita semua terus terjaga dengan baik serta kalian semua selalu sehat
19. Kuliah Kerja Nyata Desa Kalirejo, Dimas, Ari, Anin, Sugianti, Dewi, Violita. Terimakasih untuk semangat dan doa yang selalu diberikan, Semoga semua selalu dipermudah dalam menggapai gelar sarjana dan mewujudkan cita-cita masing-masing.
20. Teman-Teman baikku yaitu Ayuni, Rizal, Argun, Nurul, Maya. Terimakasih telah

mendengarkan keluh-kesah penulis dan membantu di kala penulis merasa kesulitan. Semoga kalian selalu berada dilindungan Allah SWT dan selalu dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan, Semoga Allah SWT selalu mempermudah segala urusan kedepannya dan sukses dengan karir masing-masing.

21. Kepada Setiawan Bani, Terimakasih banyak atas dukungan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.
22. Tanpa mengurangi rasa hormat, cinta dan kasih sayang, Terimakasih kepada seluruh kerabat terdekat yang tidak disebutkan dikarenakan keterbatasan penulis, jika nama kamu tidak tertulis di sanwacana ini, percayalah kamu juga sangat berarti dalam kehidupan dan juga proses penyelesaian skripsi ini. Walaupun nama kamu tidak tertulis namun kebaikan kamu tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Terimakasih atas bantuan, support, semangat, doa dan kebaikan lainnya. Semoga selalu berada dilindungan Allah SWT, dipermudah segala urusan dan selalu diberikan kesehatan, Doa terbaik untuk kamu wahai orang baik. Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 19 Januari 2023
Penulis,

Dela Rosita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
II . TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan tentang Kebijakan Publik.....	9
2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan	10
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan	10
2.3.2 Model – Model Implementasi Kebijakan	11
2.4 Tinjauan tentang <i>Stunting</i>	19
2.4.1 Definisi <i>Stunting</i>	19
2.4.2 Penanganan dan Pencegahan <i>Stunting</i>	20
2.5 Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5.1 Wawancara	28
3.5.2 Observasi	29

3.5.3	Dokumentasi.....	30
3.6	Teknik Analisis Data	31
3.6.1	Reduksi data (<i>data reduction</i>).....	32
3.6.2	Penyajian data (<i>data display</i>).....	32
3.6.3	Penarikan kesimpulan (<i>conclusion drawing/verification</i>).....	32
3.7	Teknik Keabsahan Data	33
3.7.1	Uji kredibilitas	33
3.7.2	Uji transferabilitas	34
3.7.3	Uji dependabilitas	34
3.7.4	Uji konfirmabilitas.....	34
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Pekon Pamenang	36
4.1.1	Sejarah dan Pemerintahan Pekon Pamenang.....	36
4.1.2	Luas Wilayah dan Letak Geografis Pekon Pamenang	38
4.1.3	Keadaan Penduduk Pekon Pamenang	39
4.1.4	Kondisi dan Fasilitas Kesehatan Pekon Pamenang	42
4.2	Hasil Penelitian	43
4.2.1	Organisasi	43
4.2.2	Interpretasi	56
4.2.3	Aplikasi atau Penerapan	60
4.3	Pembahasan Penelitian	69
4.3.1	Organisasi	70
4.3.2	Interpretasi	78
4.3.3	Aplikasi atau Penerapan	81
4.3.4	Faktor Pendukung dan Penghambat	86
V.	PENUTUP.....	91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data <i>Stunting</i> Kabupaten Pringsewu	2
2. Data Prevalensi <i>Stunting</i> 5 Pekon Tertinggi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020	3
3. Matriks Perbandingan Penelitian.....	8
4. Intervensi Gizi Spesifik	21
5. Intervensi Gizi Sensitif.....	22
6. Informan Penelitian	29
7. Daftar Observasi Penelitian.....	30
8. Dokumen Penelitian	31
9. Pergantian Kepemimpinan Kepala Pekon Pamenang	36
10. Jumlah Penduduk dan Rekapitulasi Penerima Bantuan	40
11. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Sedang ditempuh.....	40
12. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	41
13. Kondisi Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita di Pekon Pamenang Tahun 2021.....	42
14. Matriks Hasil Penelitian	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.....	11
2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Jones.....	13
3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn.....	16
4. Kerangka Pikir.....	25
5. Struktur Pemerintahan Pekon Pamenang	38
6. Peta Lokasi Pekon Pamenang.....	39
7. Dokumentasi Pembagian Bantuan PMT dari Pemerintah Pekon Pamenang	47
8. Struktur Organisasi Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang	52
9. Kunjungan Bidan Desa dan KPM untuk Validasi Kondisi Balita.....	54
10. Penandatanganan Komitmen Bersama Rembuk <i>Stunting</i> Pekon Pamenang	57
11. Monitoring Tim Gebrak Princes Pringsewu Ke Pekon Pamenang dan Pasir Ukir	61
12. Kegiatan Posyandu di Pekon Pamenang	64
13. Penyuluhan Pencegahan <i>Stunting</i>	65
14. Kegiatan Kelas Ibu Hamil di Pekon Pamenang	66

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan dibawah rata-rata balita pada umumnya. Balita dikategorikan *stunting* apabila panjang badan atau tinggi badannya lebih dari minus dua standar di bawah median standar pertumbuhan anak dari WHO (*World Health Organization*). *Stunting* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. *Stunting* jika tidak segera diatasi maka akan berpotensi menyebabkan perkembangan otak melambat, keterbelakangan mental, dan rendahnya kemampuan belajar (Kementerian Kesehatan, 2018). Angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih melebihi batas normal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebesar 20%. Berdasarkan *Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)* untuk tahun 2018 angka *stunting* di Indonesia mencapai 30,8%, tahun 2019 sebesar 27,67% dan tahun 2020 sebesar 26,92% (Kementerian Sekretariat Republik Indonesia, 2021).

Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi dalam membuka musrenbangnas RPJMN 2020-2024 menargetkan penurunan *stunting* untuk lima tahun kedepan di angka 14%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bappenas) mengeluarkan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep/42/M.Ppn/Hk/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus *Intervensi* Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021. Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu dari 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan *stunting* tahun 2021 (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Berikut ini merupakan hasil pemantauan status gizi Kabupaten Pringsewu yang disajikan dalam tabel.

Tabel 1. Data *Stunting* Kabupaten Pringsewu

No.	Tahun	Persentase (%)	Keterangan
1.	2018	20,19	SSGI
2.	2019	17,76	SSGI
3.	2020	7,57	E PPGBM
4.	2021	6,45	E PPGBM

(Sumber : Dinas Kesehatan Pringsewu (2021))

Tabel 1 terdapat dua jenis pengambilan data *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan riset berskala nasional yang dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendapatkan angka status gizi masyarakat terutama balita yang dilakukan dengan mendata balita secara langsung ke rumah balita tersebut. Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dilakukan untuk mendapatkan status gizi pada balita yang dilakukan dengan cara penginputan data berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulan (Bappenas, 2022). Perbedaan sumber data *stunting* tersebut dikarenakan sejak tahun 2020 pendataan *stunting* di Kabupaten Pringsewu dilakukan secara *online* melalui E-PPGBM. Hal tersebut karena data yang didapatkan dari E-PPGBM merupakan data langsung dari Pekon melalui kegiatan posyandu sedangkan data SSGI hanya perwakilan disetiap kecamatan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam membuat kegiatan dan program kami acuannya menggunakan dana E-PPGBM (Wawancara dengan Yulia Setyaningrum, 22 Desember 2022 di Bappeda Kabupaten Pringsewu).

Kabupaten Pringsewu tahun 2021 menetapkan 21 pekon sebagai lokus penanganan *stunting*. Penetapan tersebut termuat dalam Keputusan Bupati Nomor:B/529/KPTS/B.01/2020 tentang Penetapan Pekon/Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Pringsewu. Pekon tersebut melaksanakan kebijakan percepatan penurunan *stunting* dengan tim pelaksana yaitu Bidan Desa, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu, Petugas Gizi Puskesmas, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa (PKK), dan Aparatur Pemerintahan Pekon dengan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Pringsewu melakukan pengawasan dengan cara *monitoring* setiap enam bulan sekali bersama dinas lainnya yang terkait dalam penanganan *stunting*.

Tabel 2. Data Prevalensi *Stunting* 5 Pekon Tertinggi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

No.	Pekon	Presentase (%)
1.	Pamenang	26,94
2.	Pasir Ukir	22,30
3.	Ambarawa Timur	19,35
4.	Totokarto	18,59
5.	Way Ngison	18,25

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu, 2022)

Tabel 2 diketahui bahwa Pekon Pamenang termasuk dalam lima besar *prevalensi stunting* tertinggi di Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut menyebabkan Pekon Pamenang menjadi Pekon lokasi fokus intervensi *stunting* tahun 2021. *Stunting* di Pekon Pamenang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena masyarakat Pekon Pamenang kurang peduli dengan pola makan dan gizi yang diberikan kepada anak. *Stunting* pada balita disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap gizi yang dikonsumsi balita, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Mencegah *stunting* dilakukan sejak masih dalam kandungan, ibu hamil harus memperhatikan gizi pada makanan yang dikonsumsi dan harus menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran dan kepedulian, serta partisipasi semua masyarakat sangat dibutuhkan untuk pencegahan, penanggulangan dan penanganan (Kementerian Kesehatan, 2018).

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam Surat Edaran *Stunting* Nomor 050/572/B.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aksi Gerakan Bersama Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 mengenai pembentukan organisasi dalam tim penanganan *stunting* tingkat Pekon. Organisasi Pemerintah Pekon Pamenang telah membentuk tim penanganan *stunting* yang bernama tim Gerakan Bersama Pringsewu Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Pekon Pamenang. Tim Gebrak Princes tersebut terdiri dari Aparatur Pemerintah Pekon, Bidan Desa Pamenang, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu,

Kader BKB, Kader Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa (PKK), Karang Taruna, KUA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pekerja Sosial Masyarakat. Namun dalam tim Gebrak Princes tersebut proses pembagian tugas dan tupoksi masing-masing anggota masih belum tersedia dengan jelas. Anggota tim yang lain menganggap semua tugas dari penanganan *stunting* itu adalah tugas dari sektor kesehatan terkait seperti KPM (Kader Pembangunan Manusia), Kader Posyandu, Bidan Desa dan Aparatur Pemerintah Pekon padahal permasalahan *stunting* merupakan permasalahan yang harus dihadapi secara bersama-sama (Hasil wawancara dengan Ibu Emi, Bidan Desa Pamenang pada 15 Juni 2022, Puskesmas Rawat Inap Bumiratu).

Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang dalam rangka menyampaikan pemahaman dan informasi tentang *stunting* telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat dan juga anggota tim. Kegiatan penyuluhan juga dilakukan di setiap kegiatan posyandu dan kelas ibu hamil yang dilakukan rutin setiap bulan. Berdasarkan hasil pra riset yang didapatkan oleh peneliti pemahaman masyarakat dan anggota tim Gebrak Princes tentang *stunting* masih rendah dan pola asuh orang tua di Pekon Pamenang masih kurang baik. Pemerintah Pekon Pamenang telah mendukung proses penanganan *stunting* dari aspek finansial dan ketersediaan fasilitas pendukung. Aspek finansial Pemerintah Pekon Pamenang wajib menganggarkan anggaran dana desa untuk kegiatan penanganan *stunting* hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021. Anggaran dana tersebut disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan makanan tambahan bagi balita *stunting* juga telah diberikan oleh Pemerintah Pekon Pamenang. Selain itu, anggaran tersebut juga telah dipergunakan untuk membeli alat pengukur tinggi badan balita dalam mendorong optimalisasi kegiatan posyandu di Pekon Pamenang.

Setiap bulan tim Gebrak Princes melakukan kegiatan posyandu untuk memantau tinggi dan berat badan balita. Antusias masyarakat Pekon Pamenang yang mengikuti posyandu menyebabkan posyandu di Pekon Pamenang dibagi menjadi empat tempat dengan empat kader posyandu yang tersebar pada lima dusun di Pekon Pamenang. Selain itu, Tim Gebrak Princes juga mengadakan kegiatan posyandu khusus bagi

masyarakat Pekon Pamenang yang tinggal dilingkungan sekitar pesantren. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu cukup besar, namun ketika anak mereka sudah dinyatakan menderita *stunting* oleh Bidan Desa mereka malu untuk datang ke posyandu kembali. Hal tersebut menghambat penanganan dan pengukuran balita yang seharusnya dilakukan *update* status gizi menjadi terhambat (Hasil wawancara dengan Ibu Emi, Bidan Desa Pamenang pada 15 Juni 2022, Puskesmas Rawat Inap Bumiratu).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di Desa Lemah Mulya, Kabupaten Karawang hasil penelitian yang dilakukan oleh Bestraningsih, Yulyana, & Aryani (2022) menyatakan partisipasi masyarakat di Desa Lemah Mulya masih rendah dalam mengikuti kegiatan posyandu sehingga sulit bagi kader untuk dapat memantau serta menjangkau seluruh masyarakat sehingga menghambat proses penanganan *stunting*. Sedangkan hasil penelitian Novianti (2021) di Desa Medini menyatakan bahwa peran posyandu harus dioptimalkan karena dapat membantu menangani *stunting* dalam memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Hasil penelitian Mulawarman (2021) di Kabupaten Lahat menyatakan bahwa *stunting* tidak hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu, namun bisa terjadi pada semua lapisan masyarakat karena *stunting* lebih disebabkan oleh peranan pola asuh dalam keluarga seperti memberikan makan, cara mengasuh, menjaga kebersihan serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Kampar, penelitian yang dilakukan oleh Fahriza (2020) menyatakan bahwa faktor utama penyebab tingginya *stunting* di Kabupaten Kampar bukan dari perekonomian yang rendah, namun dari pola asuh orangtua, pola makan dan sanitasi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi kebijakan penanganan *stunting* dan apa faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Peneliti dalam menganalisis penelitian ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut

Jones (1996) dengan tiga pilar yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Peneliti menggunakan teori tersebut untuk melihat bagaimana Pekon Pamenang menangani *stunting* dengan melihat tentang bagaimana organisasi yang ada di Pekon Pamenang, proses interpretasi pemahaman *stunting*, dan penerapan kegiatan penanganan *stunting* yang dilakukan. Sehubungan dengan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan *stunting* di di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tahun 2021?.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tahun 2021?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pilar organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tahun 2021.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan yaitu pada mata kuliah implementasi kebijakan publik agar dapat menganalisis implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi untuk masyarakat dan segala pihak yang terlibat dalam rangka untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang.

II . TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan referensi dan memperdalam kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Perbandingan Penelitian

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Desprita Nurkholilah, 2021	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Fisiologi Masyarakat Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	Menganalisis proses implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Kumpeh Ulu dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Charles O. Jones yang terdiri dari 3 pilar yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan agar melihat tingkat kesejahteraan masyarakat penerima bantuan perumahan swadaya.	Pelaksanaan program stimulan perumahan swadaya dinilai standar dalam hal kondisi rumah bagi penerima manfaat, namun hampir separuh (48%) penerima manfaat masih memiliki rumah di bawah standar dan tidak memenuhi target dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan swadaya dalam kemudahan akses pendidikan dan kesehatan masih kurang.
2.	Erina Fahzira, 2020	Implementasi Kebijakan Penurunan <i>Stunting</i> Di Kabupaten Kampar	Menganalisis proses implementasi kebijakan penanganan <i>stunting</i> yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III.	Pelaksanaan kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Kampar belum optimal, hal tersebut dikarenakan oleh komunikasi dalam mensosialisasikan masih kurang, sikap staf masih kurang motivasi kerja dan memperhatikan kapasitas kerja.
3.	Nirwanasari, 2020	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa	Mengetahui implementasi pemerintah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.	Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa belum optimal.

(Sumber : diolah oleh peneliti,2022)

Berdasarkan perbandingan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai implementasi kebijakan terhadap beberapa permasalahan yang dikaji untuk memperdalam peneliti dalam pembahasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai permasalahan yang diangkat dan lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan lokasi penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian karena kondisi geografis dan masyarakat yang berbeda di setiap daerah yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pilar organisasi, interpretasi, dan penerapan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang tahun 2021. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Jones (1984) yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi.

2.2 Tinjauan tentang Kebijakan Publik

Jones (1984) mengungkapkan bahwa kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah kebijakan sering disamakan atau digantikan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan *grand design* (Jones, 1984). Kebijakan diartikan juga sebagai suatu upaya untuk mengalokasikan nilai secara paksa kepada masyarakat. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu itu merupakan setiap aturan dalam kehidupan bersama antar warga maupun warga dengan pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas (Hernimawati, Dailiti, & Sudaryanto, 2017).

Adanya kebijakan publik masyarakat dituntut untuk dapat selaras dan sejalan dengan nilai yang telah ditentukan dan ingin dicapai oleh pemerintah. Kebijakan publik sangat luas jangkauannya karena menyangkut berbagai bidang seperti hukum, politik, budaya, ekonomi dan sosial (Nurkholilah, 2021). Lasswell dalam Nirwanasari (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diwujudkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mengevaluasi informasi yang telah tersedia dan selanjutnya memecahkan masalah tersebut. Beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan segala permasalahan yang ada yang mencakup kepentingan masyarakat luas.

2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Kebijakan terbentuk melalui beberapa proses yaitu penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan lahirnya kebijakan baru. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan karena pada tahap ini kebijakan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tahap implementasi ini akan terlihat dampak dari kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat apakah dampak yang baik mampu mengatasi permasalahan masyarakat atau sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya (Nurkholilah, 2021). Edwards III (1980) juga mengungkapkan bahwa tahap implementasi penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan-tindakan dari keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi usaha-usaha mengubah keputusan yang telah ditentukan menjadi kegiatan operasional dalam periode waktu tertentu atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi dipandang sebagai proses untuk melaksanakan program, pelaksana harus menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan dalam mengurus permasalahan

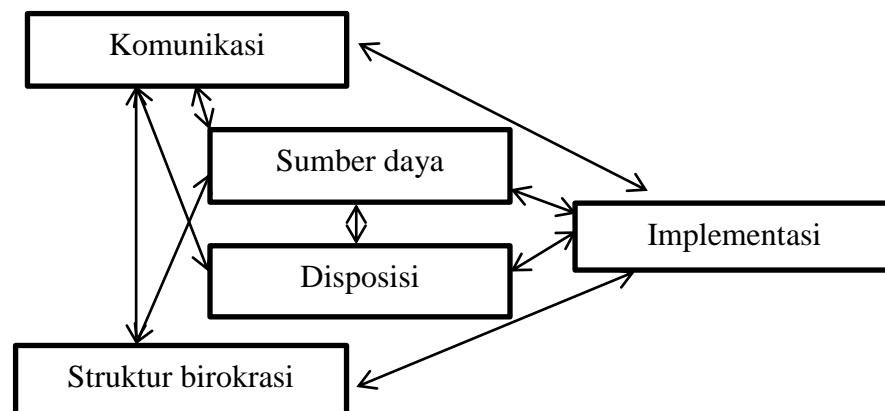
lingkungan, kelompok sasaran dan hal lain (Fahzira, 2020). Beberapa definisi implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penerapan kebijakan oleh pelaksana kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan ataupun sasaran kebijakan.

2.3.2 Model – Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan akan mudah dimengerti apabila dianalisis menggunakan model tertentu. Model yang digunakan akan memberikan gambaran mengenai suatu objek, keadaan, maupun proses sehingga mempermudah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak (Nirwanasari, 2020). Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang model implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut:

a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Edward III (1980) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses yang penting karena suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain jika digambarkan seperti gambar berikut ini



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
(Sumber: Edward III (1980))

Edward III (1980) beranggapan bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu indikator penting yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, karena menentukan dari pencapaian tujuan kebijakan publik itu sendiri. komunikasi harus dilakukan secara efektif antara para pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tujuan ataupun sasaran kebijakan untuk selanjutnya dijelaskan dengan baik dan jelas kepada kelompok sasaran, sehingga mengurangi penyimpangan dalam implementasi.

b) Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan. Apabila isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang layak dan memadai. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, kompetensi implementor dan juga sumber daya finansial. Edward III dalam Anggreni (2022) menyatakan bahwa sumber daya diposisikan sebagai input dalam suatu organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Sumber daya juga berkaitan dengan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam proses implementasi kebijakan.

c) Disposisi atau sikap pelaksana

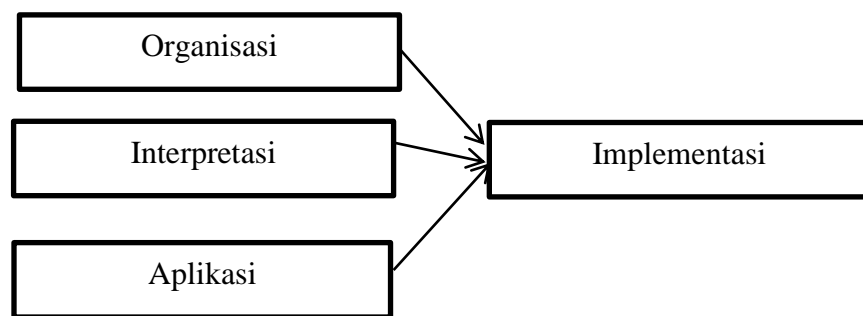
Disposisi atau sikap pelaksana yaitu karakteristik atau watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, antara lain kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila sikap para pelaksana mempunyai kecenderungan pada sikap positif serta adanya dukungan yang diberikan pada proses implementasi kebijakan maka kemungkinan besar tujuan awal yang telah

ditentukan akan tercapai. Namun sebaliknya, apabila sikap para pelaksana bersikap negatif dan menolak terhadap proses implementasi kebijakan karena terdapat konflik kepentingan maka hal tersebut dapat menjadi kendala yang serius jika tidak diatasi (Anggreni, Lubis, & Kusmanto, 2022).

d) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam proses implementasi kebijakan (EdwardsIII, 1980). Implementasi kebijakan kaitannya erat dengan birokrasi. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada dalam organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Aspek penting dalam struktur organisasi adalah dengan adanya SOP (*standard operating procedures*). SOP tersebut dijadikan pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan untuk bertindak. SOP tersebut juga dapat berupa struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang dan rumit akan cenderung melemahkan pengawasan serta menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur birokrasi yang baik adalah struktur organisasi yang tidak berbelit-belit dan efektif (Anggreni, Lubis, & Kusmanto, 2022).

b. Model Implementasi Kebijakan Menurut Charles O. Jones



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Jones

(Sumber: Jones (1984))

Jones (1984) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect* yang berarti bahwa implementasi merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan

untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Implementasi kebijakan terdiri dari tiga pilar utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*.

a) Pilar organisasi

Pilar organisasi merupakan kegiatan atau upaya dalam membentuk struktur organisasi, sumber daya dan metode dalam melaksanakan dan mengarahkan suatu program agar dapat berjalan sesuai rencana, pedoman, standar, dan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Pilar organisasi dalam implementasi kebijakan kaitannya erat dengan birokrasi. Setiap kegiatan memerlukan birokrasi agar dapat berkomunikasi dengan pihak pembuat kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan (Ilham, Yulianto, & Sulistiowati, 2021). Tujuan dari adanya organisasi tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjalankan program-program yang telah direncanakan. Jones mengartikan kegiatan organisasi dalam implementasi kebijakan dikaitkan dengan menentukan unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi tersebut menjadi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi (Jones, 1984). Terdapat beberapa indikator dalam pilar organisasi yaitu :

1) Sumber daya

Sumber daya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan, hal tersebut karena keberadaan sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya memperhatikan kesiapan dan ketersediaan sumber daya pelaksana program. Sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan suatu program terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya finansial (Yusuf, Beki, & Sukarno, 2017).

2) Unit-unit atau struktur organisasi

Jones mendefinisikan struktur organisasi sebagai suatu sistem formal dari aturan, tugas dan hubungan otoritas yang mengawasi tentang bagaimana anggota organisasi tersebut dapat bekerja sama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan yang

ingin dicapai (Jones, 1984). Adanya struktur organisasi dapat memudahkan proses implementasi karena dapat diketahui pihak mana sajakah yang terlibat dan bagaimana kedudukannya didalam organisasi tersebut.

3) Metode-metode

Hardjana dalam Ponto (2016) menjelaskan bahwa metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kegunaan sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen dengan memperhatikan dinamika dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan. Metode yang dimaksudkan dalam kegiatan organisasi adalah tentang bagaimana suatu organisasi tersebut melakukan sesuatu untuk menjalankan kebijakan tersebut kepada masyarakat agar dapat berjalan sesuai pedoman, rencana, standar, dan tujuan yang diinginkan (Nurkholilah, 2021).

b) Pilar interpretasi

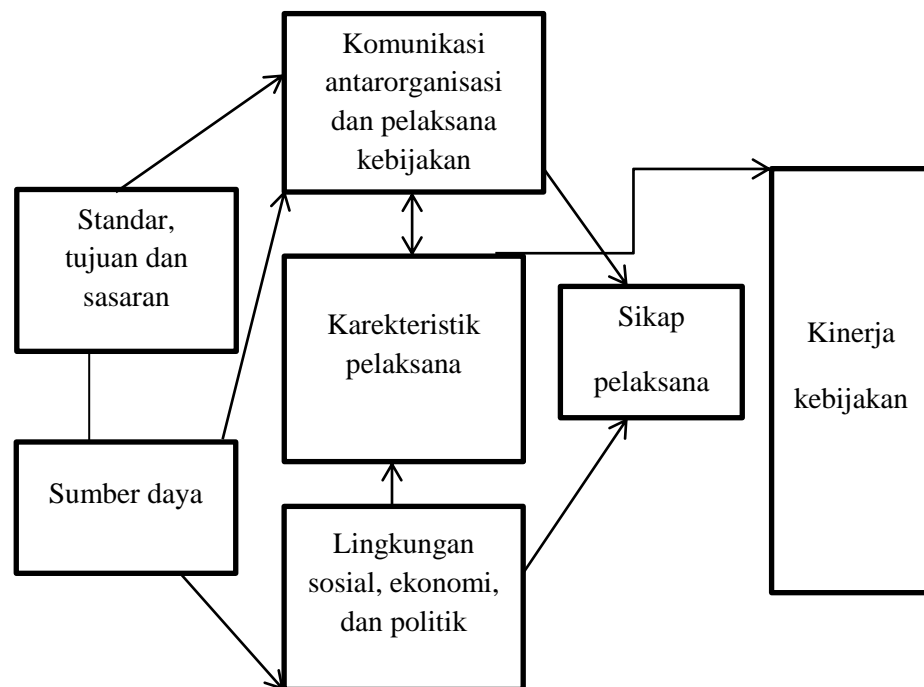
Pilar interpretasi merupakan kegiatan atau upaya penjelasan kepada pelaksana dan kelompok sasaran dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar dapat dimengerti maksud kebijakan tersebut dan tata cara pelaksanaan serta aturan dalam kebijakan. Pilar ini dilakukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang diinginkan (Jones, 1984). Interpretasi diartikan juga sebagai tahapan penjabaran dari sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis penerapannya agar mudah dimengerti oleh pelaksana kebijakan dan juga masyarakat penerima kebijakan tersebut.

Pilar interpretasi juga tidak hanya proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan teknis, tetapi juga berupa proses komunikasi dan kegiatan sosialisasi dari maksud kebijakan tersebut, baik yang berbentuk abstrak ataupun mendetail mengenai operasional (Puspitasari, 2017). Kegiatan interpretasi juga melihat apakah penerapan dari kebijakan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

c) Pilar aplikasi atau penerapan

Pilar aplikasi merupakan kegiatan dan upaya pelaksanaan atau merealisasikan suatu kebijakan yang sesuai dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang diinginkan. Aktivitas aplikasi harus memuat prosedur kerja yang jelas sehingga kebijakan bisa berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun dan direncanakan agar tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya. Prosedur kerja juga digunakan untuk membantu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola suatu pekerjaan tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan (Jones, 1984). Pilar aplikasi atau penerapan ini merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan kedalam suatu program atau kegiatan yang dilakukan secara rutin (Puspitasari, 2017).

c. Model Implementasi Kebijakan Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

(Sumber: Van Meter dan Van Horn, (1975))

Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan, antara lain:

a) Standar, tujuan dan sasaran

Van Meter dan Van Horn (1975) mengidentifikasi indikator kinerja yang krusial dalam proses implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dalam proses implementasi tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna untuk menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara mendetail dan menyeluruh. Keberhasilan proses implementasi kebijakan publik bisa diukur apabila ukuran dan tujuan dari kebijakannya realistis dengan budaya sosial yang ada di lingkungan pelaksana kebijakan.

b) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan publik sangat tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan sumber daya yang dimaksud dalam proses implementasi tersebut berupa sumber daya manusia, finansial dan juga waktu. Ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain, oleh karena ketiga sumber daya tersebut harus seimbang ketersediaannya. Apabila sumber daya manusia yang telah tersedia dengan baik dan kompeten namun sumber data finansial anggaran tidak tersedia maka akan menjadi suatu masalah untuk merealisasikan tujuan dari kebijakan tersebut. Serupa dengan sumber daya waktu, apabila sumber daya manusia telah giat bekerja dan finansial telah berjalan dengan baik namun terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat dan singkat hal ini juga dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan dalam implementasi kebijakan.

c) Karakteristik pelaksana

Karakteristik Pelaksana mencakup norma-norma, struktur birokrasi, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam suatu birokrasi yang akan

mempengaruhi implementasi kebijakan. keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan. Jangkauan wilayah implementasi kebijakan juga diperhitungkan apabila hendak menentukan para agen pelaksananya. Semakin luas wilayah implementasi kebijakan maka semakin besar pula pelaksana yang terlibat.

d) Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan. Penerimaan dan penolakan akan mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilakukan merupakan hasil perumusan pemerintah bukan dari warga setempat yang mengetahui permasalahan yang dirasakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh para pelaksana kebijakan, yaitu karena tujuan kebijakan yang bertentangan dengan nilai pribadi para pelaksana, adanya kesetiaan terhadap ekstra organisasi, adanya kepentingan diri sendiri.

e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana

Tujuan dan sasaran yang baik akan menjadi sia-sia dalam proses implementasi apabila tidak dikomunikasikan dengan baik di antara para pelaksana kebijakan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) implementasi yang efektif ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan tujuan, ukuran dan sasaran dari kebijakan tersebut. Semakin baik komunikasi dan koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil juga kemungkinan kesalahan-kesalahan akan terjadi.

f) Faktor lingkungan (ekonomi, sosial, politik)

Faktor lingkungan yaitu tentang peran lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam proses implementasi perlu diperhatikan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sekitar agar mendukung dalam proses implementasi kebijakan (Meter & Horn, 1975).

Berdasarkan 3 teori tersebut peneliti menggunakan model implementasi menurut Charles O. Jones dengan 3 aktivitas atau aspek penting yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Peneliti menggunakan teori tersebut karena teori tersebut mampu menjawab mengenai permasalahan *stunting* di Pekon Pamenang berkaitan bagaimana organisasi yang ada di Pekon Pamenang, proses interpretasi pemahaman *stunting*, dan penerapan kegiatan penanganan *stunting* yang dilakukan oleh Pekon Pamenang.

2.4 Tinjauan tentang *Stunting*

2.4.1 Definisi *Stunting*

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang diderita oleh balita karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada tinggi badan anak sehingga lebih rendah atau pendek dari standar tinggi badan usianya (P2PTM Kemenkes RI, 2018). UNICEF (*United Nations Children's Fund*) juga mengartikan *stunting* sebagai kondisi dimana tinggi badan di bawah minus dan minus 3 yang diukur dengan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO pada anak usia 0 sampai 59 bulan (Kementerian Kesehatan, 2019).

Pemerintah dalam memperjelas mengenai definisi *stunting* mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Keputusan tersebut memuat bahwa balita *stunting* dapat diketahui ketika balita telah diukur panjang atau tinggi badannya lalu dibandingkan hasilnya dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005, nilai *z-score*nya kurang dari -2SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai *z-score*nya kurang dari -3SD (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Periode 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan kondisi rawan menyebabkan awal terjadinya *stunting*. Periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK) merupakan kehidupan anak sejak dalam kandungan dan masa kehamilan (270 hari) hingga anak berusia 2 tahun (730 hari). Kondisi anak yang mengalami kurang gizi di periode 1000 HPK memiliki

resiko penyakit *stunting* lebih tinggi. Adapun dampak yang dapat terjadi dari *stunting*, yang dirilis oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu :

1. Dampak jangka pendek dari *stunting* adalah anak menjadi mudah sakit dan resiko kematian tinggi, peningkatan biaya kesehatan, gangguan perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak menjadi tidak optimal.
2. Dampak jangka panjang dari *stunting* adalah postur tubuh menjadi tidak optimal, resiko obesitas, menurunnya kesehatan reproduksi, dan menurunnya kapasitas belajar serta performa yang kurang optimal yang dapat mempengaruhi kapasitas kerja (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Stunting terjadi bukan hanya masa balita tetapi juga dipengaruhi oleh gizi sejak dari kandungan ibu hamil. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum hamil, saat hamil serta setelah persalinan juga mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko penyebab *stunting*. Faktor lainnya yang memperberat kondisi ibu hamil adalah hamil usia muda, hamil usia tua, sering melahirkan, dan jarak kelahiran yang dekat. Usia kehamilan ibu di bawah 20 tahun berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR mempengaruhi sekitar 20% dari terjadinya *stunting* (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

2.4.2 Penanganan dan Pencegahan *Stunting*

Upaya penurunan *stunting* dilakukan dengan dua intervensi yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi intensif.

- a. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan penanganan secara langsung seperti asupan makanan, status gizi ibu, penyakit menular, infeksi, dan kesehatan lingkungan. Intervensi ini lebih ditujukan pada anak periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang memiliki kontribusi 30% penurunan *stunting*. Intervensi ini dilakukan oleh sektor kesehatan dimulai sejak kehamilan ibu hingga melahirkan balita (Finaka, 2018). Berikut ini kegiatan yang termasuk dalam intervensi gizi spesifik yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Intervensi Gizi Spesifik

Kelompok sasaran	Intervensi prioritas	Intervensi pendukung	Intervensi prioritas sesuai kondisi
Intervensi Gizi Spesifik - Sasaran Prioritas			
Ibu hamil	a) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) b) Pemberian suplementasi tablet tambah darah	a) Pemberian suplementasi kalsium b) Pemeriksaan kehamilan	a) Perlindungan dari malaria b) Pencegahan HIV
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	a) Promosi dan konseling b) Pemberian ASI eksklusif c) Promosi dan konseling d) Pemberian makan bayi dan anak (PMBA) e) Penatalaksanaan gizi buruk f) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang g) Pemantauan dan promosi pertumbuhan	a) Pemberian suplementasi vitamin A b) Pemberian Suplementasi bubuk tabur gizi, seperti taburia c) Pemberian imunisasi d) Pemberian suplementasi <i>zinc</i> untuk pengobatan diare e) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Pencegahan Kecacingan
Intervensi Gizi Spesifik – Sasaran Penting			
Remaja putri dan wanita usia subur	Pemberian suplementasi tablet tambah darah		
Anak 24-59 Bulan	a) Penatalaksanaan gizi buruk b) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang c) Pemantauan dan promosi pertumbuhan	a) Pemberian suplementasi vitamin A b) Suplementasi bubuk tabur gizi, seperti taburia c) Pemberian suplementasi <i>zinc</i> untuk pengobatan diare d) Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)	Pencegahan Kecacingan

(Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (2019))

- b. Intervensi gizi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan di luar sektor kesehatan dan memiliki kontribusi 60% intervensi *stunting*. intervensi ini meliputi penyediaan dan memastikan akses air bersih dan sanitasi, menyediakan akses pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, dan memberikan edukasi kesehatan seksual, reproduksi serta gizi remaja (Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting*, 2019). Program atau kegiatan intervensi ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Intervensi Gizi Sensitif

Kelompok intervensi	Jenis intervensi
Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi	a) Penyediaan akses air bersih dan air minum b) Penyediaan akses sanitasi yang layak
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	a) Penyediaan akses Jaminan Kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) b) Penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) c) Penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH)
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	a) Penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media b) Penyediaan konseling perubahan perilaku antarpribadi c) Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua d) Penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak e) Penyediaan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja f) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan akses pangan bergizi	a) Penyediaan akses bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu, seperti bantuan pangan non tunai b) Pengembangan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga, seperti program Kawasan Rumah c) Fortifikasi bahan pangan utama, garam, tepung terigu, dan minyak goreng d) Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan

(Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* (2019))

2.5 Kerangka Pikir

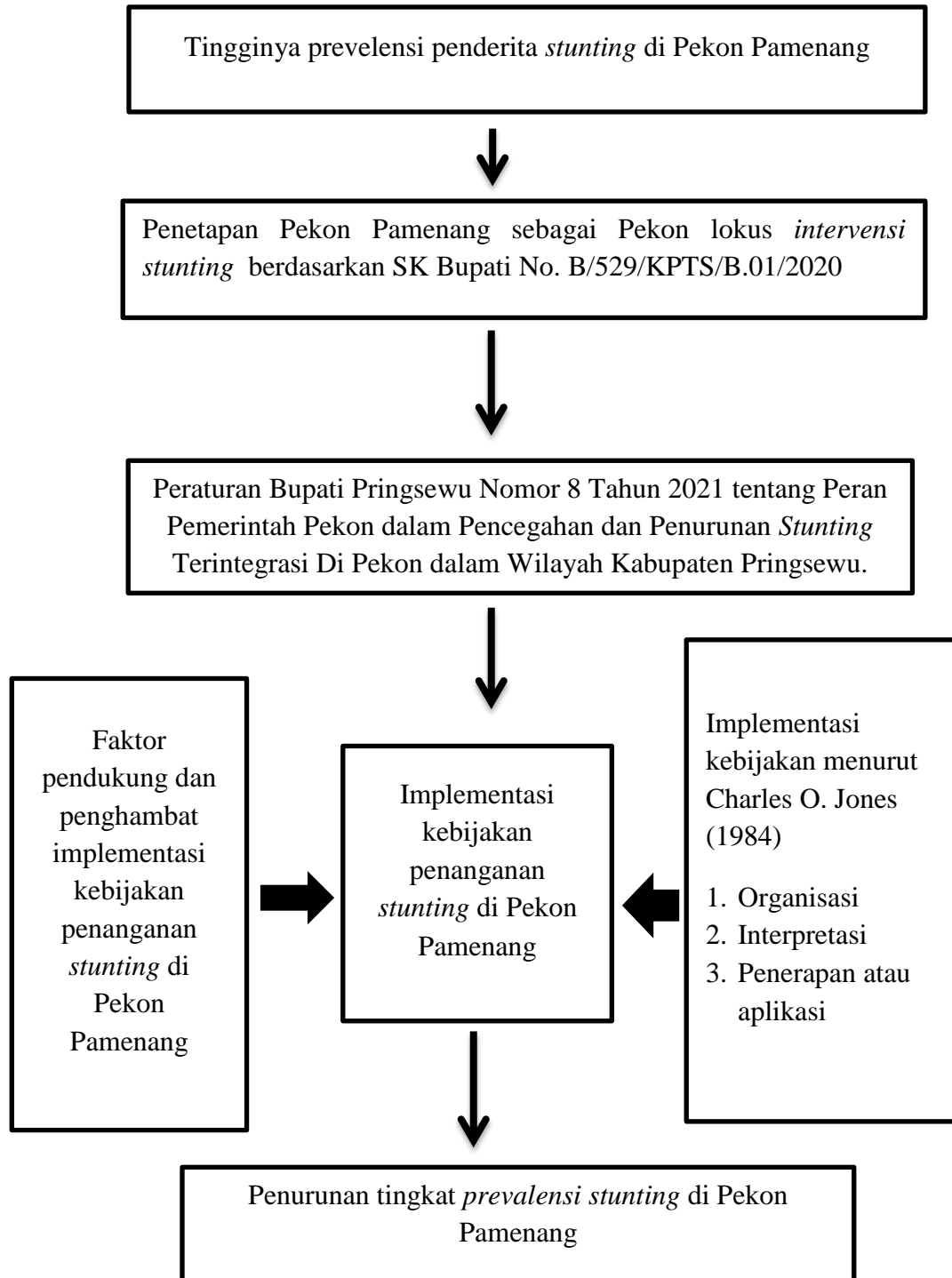
Permasalahan kesehatan merupakan permasalahan yang serius untuk ditangani karena mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Salah satu permasalahan kesehatan adalah *stunting* yang diderita oleh balita. Pekon Pamenang merupakan 1 dari 21 pekon di Kabupaten Pringsewu yang menjadi daerah lokus penanganan *stunting* tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu No. B/529/KPTS/B.01/2020. Persentase *stunting* di Pekon Pamenang sebesar 24,96% atau sekitar 73 balita. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pekon Pamenang dalam menjalankan kebijakan penanganan *stunting* yaitu dalam proses penanganan *stunting* yang masih didominasi sektor kesehatan sedangkan anggota tim lainnya belum terlibat aktif. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam Surat Edaran *Stunting* Nomor 050/572/B.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aksi Gerakan Bersama Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Pemerintah Pekon Pamenang telah membentuk tim penanganan *stunting* yang bernama tim Gerakan Bersama Pringsewu Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Pekon Pamenang. Namun dalam tim tersebut masih belum ada pembagian tugas dan tupoksi masing-masing aktor yang terlibat.

Pemahaman *stunting* yang masih rendah baik masyarakat maupun anggota tim Gebrak Princes Pekon Pamenang dan pola asuh orang tua di Pekon Pamenang yang masih buruk sehingga gizi yang dikonsumsi oleh balita masih buruk. Hal tersebut bisa disebabkan beberapa faktor, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah atau penyampaian serta sosialisasi yang masih kurang kepada masyarakat. Masalah pembiayaan berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021 semua pembiayaan kegiatan *stunting* menggunakan dana desa. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana proses implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Jones (1984) yaitu:

1. Organisasi, peneliti melihat bagaimana organisasi yang dilakukan di tingkat pekon dalam penanganan *stunting*. Dalam pilar ini peneliti melihat tentang struktur organisasi tim penanganan *stunting*, metode pelaksanaan, serta sumber

daya pelaksanaan yang mendukung dalam impementasi kebijakan penanganan *stunting*.

2. Interpretasi, peneliti melihat tentang bagaimana sosialisasi yang dilakukan apakah sudah baik atau belum dalam menyampaikan maksud dari kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat.
3. Penerapan atau aplikasi, peneliti melihat penerapan kebijakan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pusat.



Gambar 4. Kerangka Pikir

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh adalah kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata dari wawancara, dokumen pribadi, gambar, catatan lapangan dan foto. Metode kualitatif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan menyajikan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka (Moleong, 2017). Penelitian ini berusaha menggambarkan tentang implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian deskriptif adalah kata-kata, gambar dan bukan bentuk angka-angka yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (Abdussamad, 2021).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna membatasi penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk memilih data yang relevan dalam penelitian. Pembatasan ini didasarkan pada urgensi atau tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2012). Fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Tahap-tahap implementasi kebijakan menurut Jones (1984)
 - a. Organisasi yang terlibat dalam penanganan *stunting* di Pekon Pamenang yang mencakup tentang:
 - a) Sumber daya yang mendukung dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting*. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya

finansial dan alat pendukung. Sumber daya manusia meliputi aktor yang terlibat dalam penanganan *stunting* yang termuat dalam Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang. Sumber daya finansial meliputi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Pekon dalam penanganan *stunting* untuk melihat kesesuaiannya dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 tahun 2021. Ketersediaan alat pendukung yang dipergunakan dalam penanganan *stunting* di Pekon Pamenang.

- b) Struktur organisasi dalam Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang sesuai dengan Surat Edaran *Stunting* Nomor 050/572/B.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aksi Gerakan Bersama Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021. Untuk melihat apakah dalam Tim Gebrak Princes telah melakukan pembagian tugas dan fungsi dalam penanganan *stunting* di Pekon Pamenang.
 - c) Metode dalam penyampaian informasi kegiatan penanganan *stunting* kepada masyarakat Pekon Pamenang dan inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang.
- b. Interpretasi yang dilakukan oleh Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang *stunting*. Untuk melihat bentuk komunikasi antar anggota Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang sebelum melakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021.
 - c. Penerapan kegiatan penanganan *stunting* berdasarkan pedoman kinerja dan jadwal kegiatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Lokasi tersebut dipilih karena Pekon Pamenang memiliki persentase tingkat *stunting* yang paling tinggi dari dua puluh satu pekon lainnya yaitu sebesar 26,94% atau sekitar tujuh puluh tiga balita penderita *stunting*.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi yang harus diolah kembali oleh peneliti (Moleong, 2017). Informan yang dipilih merupakan Aparatur Pekon Pamenang, Bidan Desa Pamenang, Kader Pembangunan Manusia Pamenang, Kader Posyandu Pamenang, Kader PKK Pekon Pamenang dan Orangtua balita *stunting* di Pekon Pamenang.
- b. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang didapatkan penulis dari catatan, jurnal, buku-buku dan beberapa dokumen berupa laporan-laporan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah (Moleong, 2017). Data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang. Data yang sekunder yang peneliti dapatkan berasal dari arsip Pekon dan arsip Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang penanganan *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi dari seseorang. Wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dengan mengetahui informasi dari responden yang lebih mendalam (Abdussamad, 2021). Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi lebih luas dan lebih mendalam. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan alat bantu yaitu pedoman wawancara yang telah dibuat dan disesuaikan dengan data yang akan dicari. Pedoman wawancara dipergunakan sebagai acuan peneliti dalam

melakukan wawancara dengan informan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut.

Tabel 6. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Hasil penelitian
1.	Aminudin	Kepala Pekon Pamenang	1 Agustus 2022	Pemahaman <i>stunting</i> di tingkat aparaturn Pemerintahan Pekon.
2.	Jumali, S.Pd	Bendahara Pekon Pamenang	1 Agustus 2022	Anggaran dana desa yang dikeluarkan untuk penanganan <i>stunting</i> dan struktur tim Gebrak Princes.
3.	M.Irfan	Staf Kasi Pelayanan Pekon Pamenang	26 Juli 2022	Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang <i>stunting</i> .
4.	Ibu Bidan Emi	Bidan Pekon Pamenang	15 Juni 2022	Data balita <i>stunting</i> , kelas ibu hamil dan kegiatan sosialisasi <i>stunting</i> .
5.	Ibu Diana	Kader Pembangunan Manusia	26 Juli 2022	Data kegiatan penanganan <i>stunting</i> , kegiatan FGD, dan kegiatan rembuk <i>stunting</i> .
6.	Ibu Asmunah	Kader Posyandu	27 Juli 2022	Data tentang pelaksanaan kegiatan posyandu di Pekon Pamenang.
7.	Ibu Ngadinah	Ketua PKK Pekon Pamenang	26 Juli 2022	Keaktifan anggota tim Gebrak Princes.
8.	Siti Satinah	Orangtua balita <i>stunting</i> Pekon Pamenang	27 Juli 2022	Data tentang kegiatan penanganan <i>stunting</i> dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pekon Pamenang.
9.	Mimi Wiji Astuti	Orangtua balita <i>stunting</i> Pekon Pamenang	27 Juli 2022	Pendapat masyarakat tentang kegiatan penanganan <i>stunting</i> oleh tim Gebrak Princes Pekon Pamenang.
10.	Yulia Setyaningrum, S.Km., M.Kes	Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Pringsewu	22 Desember 2022	Anggaran dana untuk penanganan <i>stunting</i> dari Kabupaten.

(Sumber :diolah peneliti,2022)

3.5.2 Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara kompleks yang digunakan dalam penelitian ketika studi tersebut menyangkut perilaku manusia, proses kerja atau fenomena alam dan jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2012). Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan di Pekon Pamenang untuk mengamati semua penanganan dan penurunan intervensi *stunting*. Berikut beberapa observasi yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 7. Daftar Observasi Penelitian

No.	Kegiatan Observasi	Hasil
1.	Pengamatan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2022 di Balai Pekon Pamenang. Peneliti melakukan pengamatan tentang kelas ibu hamil yang dilakukan oleh tim Gebrak Princes di Balai Pekon Pamenang. Berdasarkan pengamatan tersebut diketahui bahwa penerapan kegiatan penanganan <i>stunting</i> telah terlaksana secara rutin dengan diikuti oleh 10 orang ibu hamil.	
2.	Pengamatan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022 di Balai Pekon Pamenang. Peneliti melakukan terkait pemasangan banner tentang <i>stunting</i> . Hal tersebut berarti Tim Gebrak Princes telah berusaha meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang <i>stunting</i> dengan bantuan media banner.	
3.	Pengamatan dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Agustus 2022 di <i>website</i> resmi Pekon Pamenang yaitu pamenang-pringsewu.desa.id untuk mengkonfirmasi pelaksanaan kegiatan rembuk <i>stunting</i> Pekon Pamenang. Kegiatan rembuk <i>stunting</i> telah dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang termuat dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021.	
4.	Pengamatan dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29 Juli 2022 di <i>website</i> resmi Pekon Pamenang yaitu pamenang-pringsewu.desa.id untuk mengetahui tentang visi misi Pekon Pamenang pada periode kepemimpinan ini yang salah satunya diketahui untuk meningkatkan kesadaran pola hidup sehat yang selaras untuk mendorong penanganan <i>stunting</i> .	

(Sumber :diolah peneliti,2022)

3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari catatan-catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun individu. Teknik pengumpulan data dokumentasi juga dapat diperoleh dari buku, publikasi akademik, jurnal, dan peraturan pemerintah (Sugiyono, 2012). Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Dokumen Penelitian

No.	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1.	Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep/42/M.Ppn/Hk/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Tahun 2021.	Penetapan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah lokus penanganan <i>stunting</i> tahun 2021.
2.	Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pekon/Desa Dan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.	Penetapan 21 Pekon di Kabupaten Pringsewu sebagai lokus penanganan <i>stunting</i> tahun 2021 termasuk Pekon Pamenang.
3.	Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pekon/Desa Dan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022.	a. Penetapan 21 Pekon di Kabupaten Pringsewu sebagai lokus penanganan <i>stunting</i> tahun 2022 termasuk Pekon Pamenang. b. Data hasil prevalensi <i>stunting</i> di 21 Pekon tahun 2021.
4.	Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Pekon dalam Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Pekon dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu.	Petunjuk teknis dan regulasi tentang penanganan <i>stunting</i> di tingkat Pekon.
5.	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi <i>Stunting</i> Pekon Pamenang Tahun 2021.	Hasil evaluasi dan hambatan serta kendala Pekon Pamenang dalam penanganan <i>stunting</i> tahun 2021.
6.	Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Kabupaten/Kota.	Pedoman pelaksanaan kegiatan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten.
7.	Surat Edaran <i>Stunting</i> Nomor 050/572/B.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aksi Gerakan Bersama Cegah <i>Stunting</i> (Gebrak Princes) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.	Pedoman pelaksanaan Gerakan Bersama Cegah <i>Stunting</i> (Gebrak Princes) Kabupaten Pringsewu.
8.	Profil Pekon Pamenang Tahun 2021.	Data profil Pekon Pamenang.
9.	Surat Keputusan Kepala Pekon Pamenang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Bersama Cegah <i>Stunting</i> (Gebrak Princes) Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.	Penetapan anggota dan struktur organisasi tim Gebrak Princes Pekon Pamenang.

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pencarian dan pencocokan secara sistematis data yang diperoleh sebelumnya, kemudian mengorganisasikan data kedalam kategori, mengelompokkannya ke dalam kelompok yang lebih kecil, merumuskan hipotesis, menyusun ke dalam pola, menentukan apa yang penting dan apa yang penting sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) mengatakan

bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, meringkas, memilih hal-hal yang pokok tentang penelitian, serta memfokuskan pada hal yang penting. Mereduksi data maka akan mempermudah peneliti dalam mencari gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dapat mencari data yang belum ditemukan (Sugiyono, 2012). Peneliti dalam melakukan reduksi data dengan cara menguraikan dan merangkum hasil penelitian ke dalam laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut berisi nama informan, jabatan, pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil uraian atau rangkuman data yang telah didapatkan dari informan yang dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan oleh peneliti dengan cara menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, bagan atau tabel yang membuat peneliti mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dan didapatkan (Sugiyono, 2012). Penyajian data dilakukan oleh peneliti dengan menguraikan data yang telah diperoleh oleh peneliti dalam bentuk uraian, tabel, dan foto.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Setelah dilakukan penyajian data peneliti melakukan penarikan kesimpulan sementara. Penarikan kesimpulan ini masih bersifat sementara yang bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti yang untuk mendukungnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap ini telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka dapat dikatakan kesimpulan tersebut kredibel (Sugiyono, 2012). Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan kesimpulan di akhir paragraf setiap aspek penelitian dari rangkaian hasil penelitian wawancara, observasi, dan dokumen yang telah disajikan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif data yang telah didapatkan sebelumnya dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Oleh karena itu, data yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data (Abdussamad, 2021). Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi sebagai berikut.

3.7.1 Uji kredibilitas

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan masa penelitian, meningkatkan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

- a. Perpanjangan masa penelitian, jika data yang terkumpul masih belum mencukupi, maka masa penelitian akan diperpanjang. Peneliti mengumpulkan kembali data dengan meninjau data atau mencari data yang sebelumnya belum diperoleh. Peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan (Sugiyono, 2012). Masa penelitian peneliti lakukan pada bulan juli-september 2022 di Pekon Pamenang.
- b. Meningkatkan ketekunan pengamatan dengan maksud untuk menemukan ciri dan unsur situasi yang paling relevan dengan masalah atau pertanyaan yang diajukan, dan untuk fokus pada hal-hal tersebut secara detail (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti lakukan dengan cara mencari referensi tentang implementasi kebijakan dan penanganan *stunting*.
- c. Triangulasi, triangulasi merupakan pengecekan terhadap data yang telah didapatkan dari berbagai cara. Triangulasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan sumber data, teknik, dan waktu (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Tabel triangulasi peneliti lakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dengan membanding data yang diperoleh oleh informan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tabel triangulasi peneliti lampiran di lampiran penelitian.

3.7.2 Uji transferabilitas

Transferabilitas merupakan uji validitas yang mengacu pada upaya peneliti membuktikan bahwa data yang didapatkan sesuai dengan sebenarnya terjadi agar hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain (Abdussamad, 2021). Uji transferabilitas dilakukan dengan cara peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data dalam konteks yang sama tentang implementasi kebijakan dalam penanganan *stunting*. Uji transferabilitas dilakukan pada pembahasan, peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk memperdalam kajian dan analisis dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting*.

3.7.3 Uji dependabilitas

Uji dependabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian relevan dengan konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, menggunakan konsep, untuk menarik kesimpulan (Abdussamad, 2021). Uji dependabilitas dilakukan peneliti dengan mendiskusikan hasil penelitian dengan dosen pembimbing. Hasil-hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti selanjutnya dikonsultasikan dan peneliti juga menyediakan data mentah, laporan lapangan, pedoman wawancara, hasil analisis serta catatan yang dipergunakan selama proses pengambilan data penelitian.

3.7.4 Uji confirmabilitas

Uji confirmabilitas merupakan uji terhadap hasil penelitian agar dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan (Abdussamad, 2021). Hal yang dilakukan dalam menguji kepastian hasil penelitian ini adalah dengan seminar proposal dan seminar hasil dengan mengundang teman sejawat, dosen pembahas dan dosen pembimbing.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti menarik kesimpulan akhir dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut diperkuat dengan temuan peneliti bahwa *persentase prevalensi stunting* Pekon Pamenang tidak menunjukkan perubahan, pada tahun 2020 sebesar 26,94% dan tahun 2021 masih tetap berada pada 26,94%. Berdasarkan temuan yang didapatkan dilapangan dalam pilar organisasi, anggota Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang masih belum terlibat aktif dalam penanganan *stunting*. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pembagian tugas dan tupoksi kinerja serta adanya rangkap jabatan dalam penanganan *stunting*. Interpretasi penanganan *stunting* yang dilakukan oleh Pekon Pamenang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Namun belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pemahaman masyarakat tentang *stunting* masih rendah. Selain itu, dalam menerapkan kebijakan penanganan *stunting* tim Gebrak Princes Pamenang belum mengetahui tentang pedoman kinerja dan petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan *stunting*.

Pekon Pamenang didukung dengan kader pembangunann manusia (KPM) yang aktif dalam penanganan *stunting* dan bantuan makanan tambahan dari Pekon serta dengan ketersediaan alat pendukung dalam kegiatan posyandu. Namun masyarakat Pekon Pamenang masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang *stunting*, keterbatasan anggaran dana desa, kurangnya pengetahuan anggota tim penanganan *stunting* tentang pedoman dan prosedur kinerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang sebagaimana hasil kesimpulan diatas masih belum terlaksana secara baik dan optimal, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Pekon Pamenang diharapkan dapat membagi dan memberikan penjelasan tentang tupoksi dan tugas masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penanganan *stunting* agar semua pihak dapat mengetahui tupoksi masing-masing dan dapat berperan aktif dalam kegiatan penanganan *stunting*.
2. Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi tentang *stunting* secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan anggota tim Gebrak Princes oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan strategi sosialisasi yang berbeda, salah satunya melibatkan pihak ketiga melalui MoU dengan perguruan tinggi di Kabupaten Pringsewu. Kegiatan sosialisasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama di Pekon Pamenang
3. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pringsewu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu tentang adanya pedoman dan prosedur kinerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada semua anggota tim Gebrak Princes di tingkat Pekon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Anggreni, D., Lubis, L. A., & Kusmanto, H. (2022). Implementasi program pencegahan stunting di puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*. Vol. 1 No. 2 (2022):Histeria: *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* .
- Bappenas. (2022, Februari 14). *Mengenal Studi Status Gizi Indonesia 2021*. Dipetik Juni 12, 2022, dari cegahstunting.id: <https://cegahstunting.id>
- Bestraningsih, A., Yulyana, E., & Aryani, L. (2022). Implementasi Program Rembug Stunting Di Desa Lemah Mulya Kabupaten Karawang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9 no.4 tahun 2022 hal:1063-1074 <https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1063-1074>.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2022, Juli 11). *Fasilitasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)*. Dipetik Oktober 25, 2022, dari sippn.menpan.go.id: [/sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id)
- EdwardsIII, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fahzira, E. (2020). Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021
- Finaka, A. W. (2018). *Penanggulangan Stunting*. Dipetik Juni 21, 2022, dari indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id>
- Hernimawati, Dailiti, S., & Sudaryanto. (2017). Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Arsip. *Jurnal Niara*. Vol.10,No 1 Juli 2017 Hal. 6-15. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i1.1883>

- Hutagaol, R. (2021). Pengaruh Promosi Kesehatan Dengan Media Audio Visual Terhadap Pengetahuan Pencegahan Stunting Kader Posyandu Di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Matanggor Kabupaten Padang Lawas Utara. *Skripsi*. Universitas Aafa Royhan
- Ilham, R., Yulianto, & Sulistiowati, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (Bosda) Bagi Siswa Yang Kurang Mampu. *Administrativa Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol 3 No 2 (2021). <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i2.74>
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Situasi Balita Pendek Stunting di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Infodatin Situasi Balita Pendek*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Edisi 1 Semester 1 Tahun 2018*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019, Desember 18). *Turunkan Stunting di Angka 14 Persen di 2024, Menteri Suharso Dorong Kerja Sama Lintas Sektoral*. Dipetik Juni 2022, 12, dari [bappenas.go.id](https://www.bappenas.go.id): <https://www.bappenas.go.id>
- Kementerian Sekretariat Republik Indonesia. (2021, Desember 15). *Angka Prevalensi Stunting tahun 2020 Diprediksi Turun*. Dipetik Juni 12, 2022, dari stunting.go.id: <https://stunting.go.id>
- Kementrian Kesehatan. (2019, November 27). *Kementrian Kesehatan Fokus pada Pencegahan Stunting*. Dipetik Agustus 29, 2021, dari <https://indonesia.go.id>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Malia, A., Farhati, Rahmah, S., Maritali, D., Nuraina, & Dewita. (2022). Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebidanan*. Vol.12 No.1 Maret Tahun 2022 Hal 73-80
- Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Vol 6, Issue 4, 1975. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

- Moleong, L. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudi, S. D., Turtiantoro, & Dewi. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Siantar Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Didesa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Siantar. *Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP* . Vol. 11, no. 4, pp. 105-117, Sep. 2022.
- Mulawarman. (2021). Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Lahat. *Thesis*. STIK Bina Husada Palembang
- Nirwanasari. (2020). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Novianti, R., Purnaweni, H., & Subowo, A. (2021). Peran Posyandu Untuk Menangani Stunting Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol 10, No 3 (2021). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31425>
- Nurkholilah, D. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Fisiologi Masyarakat Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- P2PTM Kemenkes RI. (2018, April 10). *Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi*. Dipetik Agustus 29, 2021, dari <http://www.p2ptm.kemkes.go.id>
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*. Edisi XX (Januari- Februari 2016). Vol.3 No 20 (2016).
- Puspitasari, N. (2017). Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak di Kota Pontianak. *Jurnal SI Administrasi Negara*. Vol 6. No 2 (2017) <http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v6i2.1532>.
- Rahmandiani, R. D., Astuti, S., Susanti, A. I., Handayani, D. S., & Didah. (2019). Hubungan Pengetahuan Ibu Balita Tentang *Stunting* Dengan Karakteristik Ibu dan Sumber Informasi di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten

Sumedang. *Jurnal Sistem Kesehatan*. Vol 5, No 2 (2019)
<https://doi.org/10.24198/jsk.v5i2.25661>

Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting. (2019). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil*. Jakarta Pusat: Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sumarni, D., Fajar, N. A., & Hasyim, H. (2022). Analisis Faktor Pencegahan Stunting di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.

Suryana, S. E. (2009). Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang. Skripsi. Universitas Sumatra Utara

Wiguna, S. I., Jati, S. P., & Kusumastuti, W. (2021). Implementasi Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm) Sekunder Di Balkesmas Wilayah Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 9, no. 3, pp. 319-325, May. 2021.
<https://doi.org/10.14710/jkm.v9i3.29249>

Yusuf, N. F., Bekti, H., & Sukarno, D. (2017). Implementasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung). *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 2. No 1, Agustus 2017.
<https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13682>